

## PERDAMAIAN DI SEMENANJUNG KOREA PASCA-PERTEMUAN MOON JAE-IN DAN KIM JONG UN

7

Simela Victor Muhamad

### Abstrak

*Pertemuan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Desa Panmunjom pada 27 April 2018 menjadi peristiwa penting dalam politik internasional dan memiliki nilai sejarah, karena untuk pertama kalinya pemimpin Korea Utara melintas ke wilayah Korea Selatan setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953. Pertemuan tersebut patut diapresiasi, meskipun masih menimbulkan keraguan karena tidak diikuti langkah konkret, terutama bagaimana tahapan dan kerangka waktu menuju perdamaian di Semenanjung Korea itu dilakukan. Peran China dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea tidak dapat diabaikan, karena memiliki pengaruh kuat terhadap Korea Utara dan memiliki kepentingan atas kawasan ini. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dan parlemen harus ikut mengawal proses perdamaian di Semenanjung Korea yang kini tengah memasuki perkembangan positif. Tulisan singkat ini membahas bagaimana perdamaian di Semenanjung Korea setelah pertemuan tingkat tinggi antar-Korea tersebut.*

### Pendahuluan

Pada 27 April 2018 dunia menyaksikan peristiwa penting yang terjadi di Semenanjung Korea, ketika Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, berjabat tangan di garis demarkasi militer yang memisahkan kedua Korea di Desa Panmunjom. Pertemuan mereka memicu harapan lahirnya perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Setelah peristiwa penting tersebut, kedua belah pihak melakukan pertemuan bilateral bersejarah yang

menghasilkan janji dan komitmen untuk mengakhiri Perang Korea secara resmi dengan perjanjian perdamaian yang permanen. Mereka juga berjanji bekerja sama dalam mengupayakan terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. Pertemuan antarpemimpin kedua Korea ini mendapatkan perhatian dari seluruh dunia, mengingat kondisi hubungan kedua negara yang selama ini tidak positif.

Kesepakatan bersejarah antara Presiden Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong



Un tersebut patut diapresiasi, meskipun ada yang menilainya sebagai kesepakatan “main aman”, karena tidak diikuti langkah-langkah konkret (*Kompas*, 28 April 2018: 8). Hasil kesepakatan ini, khususnya perjanjian damai, memang belum dapat dituntaskan karena masih harus dibicarakan dengan Amerika Serikat (AS) dan China. Meskipun demikian, pertemuan bilateral ini menjadi bersejarah karena untuk pertama kalinya pemimpin Korea Utara melintas masuk ke wilayah Korea Selatan setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata (bukan dengan perjanjian perdamaian) pada tahun 1953. Menjadi menarik untuk dibahas kemudian, bagaimana inisiatif perdamaian di Semenanjung Korea setelah pertemuan bersejarah pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara di Desa Panmunjom tersebut dan bagaimana pula prospeknya?

### **Keprihatinan Internasional terhadap Nuklir Korea Utara**

Perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea akhir-akhir ini telah menjadi isu internasional yang menarik untuk diikuti, karena dunia berharap ada langkah tindak lanjut dari kedua Korea (Korea Selatan dan Korea Utara) untuk mewujudkan perdamaian di antara mereka. Sebagaimana diketahui, bangsa Korea telah terbagi dua pasca-Perang Korea yang berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata pada 1953. Setelah perang dengan korban tewas sekitar 1,2 juta orang itu, Semenanjung Korea dibagi dua berdasarkan garis ideologi (Don Oberdorfer and Robert Carlin, 2014: 2-8). Di sisi utara berdiri negara komunis, sementara di selatan dibangun negara yang menganut

demokrasi liberal. Bangsa yang semula satu itu akhirnya terpisah.

Tanpa Pakta Perdamaian permanen, kondisi Semenanjung Korea selalu diwarnai ketegangan. Korea Utara senantiasa mengancam kehadiran kekuatan militer AS di wilayah Korea Selatan. Korea Utara juga terus mengeluarkan ancaman, terutama terhadap AS, melalui uji coba nuklir dan rudal balistik. Sejak 2006 hingga 2017, Korea Utara telah melakukan enam kali uji coba senjata nuklir, termasuk jenis bom hidrogen yang kekuatannya diklaim mencapai 100 kilo ton, lebih kuat dari bom atom yang pernah dijatuhkan AS di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang, pada akhir Perang Dunia Kedua (*Sindonews.com*, 6 Januari 2016). Oleh karena itu masyarakat internasional, terutama melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, sering mengingatkan Korea Utara untuk menghentikan semua uji coba senjata nuklirnya.

Program pengembangan nuklir Korea Utara dipengaruhi dan didominasi oleh pemikiran Kim Il Sung, yang meyakini bahwa tindakan negaranya ini akan memberikan keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur. Pada tahun 1990-an, ancaman nuklir Korea Utara semakin meningkat dengan penarikan diri Korea Utara dari perjanjian non-proliferasi nuklir pada bulan Maret 1993. Masa ini juga ditandai dengan meninggalnya Kim Il Sung pada tahun 1994. Posisinya digantikan oleh Kim Jong Il, putra sulung Kim Il Sung, yang ternyata juga memiliki keinginan besar untuk mengembangkan program nuklir.

Berkuasanya Kim Jong Un pada akhir tahun 2011, setelah ayahnya (Kim Jong Il) meninggal, tidak membuat Korea Utara surut mengembangkan program nuklir, bahkan semakin memanasakan situasi keamanan di Semenanjung Korea. Secara politis, nuklir (khususnya senjata nuklir) menjadikan Korea Utara memiliki daya tawar dalam menghadapi komunitas internasional, selain sebagai alat untuk mempertahankan rezim yang dapat memperluas dukungan domestik dan penangkal potensial dalam menghadapi ancaman dari luar, khususnya dari AS dan Korea Selatan. Namun demikian, pada saat bersamaan nuklir Korea Utara telah menimbulkan keprihatinan internasional, sehingga perdamaian di Semenanjung Korea menjadi penting untuk diupayakan.

Apabila melihat ke belakang, upaya perdamaian sesungguhnya pernah dilakukan pada tahun 2000 melalui pertemuan Kim Jong Il dan Kim Dae-jung. Pada saat itu Korea Utara tengah dilanda kelaparan hebat yang menewaskan sekitar dua juta jiwa. Pertemuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung itu membawa harapan bagi Korea Utara. Kim Dae-jung, setiap tahun, antara lain mengirim ratusan ribu ton makanan dan pupuk ke Korea Utara. Atas langkah ini, Kim Dae-jung dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2000.

Pertemuan kedua diselenggarakan di era Presiden Roh Moo-hyun pada tahun 2007, yang sepakat mendorong perkembangan ekonomi kedua Korea. Sayangnya, setiap kali perjanjian disepakati, setiap kali itu pula perjanjian tidak berlanjut dan memberi ruang yang

lebih besar lagi bagi Korea Utara untuk mengembangkan program nuklir dan rudal balistiknya.

## **Dunia Menunggu Langkah Konkret**

Upaya damai di Semenanjung Korea seakan menemukan titik terang ketika pada 27 April 2018, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Presiden Korea Selatan Moo Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu di Panmunjom, yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan bilateral di antara mereka. Pembicaraan bilateral bersejarah ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu: **pertama**, Korea Selatan dan Korea Utara akan meningkatkan hubungan demi kesejahteraan bersama dan bersatu kembali secara mandiri; **kedua**, Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama mengurangi ketegangan militer; dan **ketiga**, Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama mewujudkan perdamaian abadi Semenanjung Korea (*Kompas*, 28 April 2018: 8).

Tidak ada yang pernah membayangkan pertemuan kedua pemimpin Korea ini akan bisa terjadi, apalagi bila mengingat ketegangan di Semenanjung Korea pada tahun lalu. Pada saat itu Korea Utara, Korea Selatan, dan AS sudah seperti akan berperang karena saling ancam dan unjuk kekuatan militer. Namun akhirnya ini hubungan AS-Korea Utara membaik sejalan dengan kesediaan Kim Jong Un untuk membicarakan penghentian program pengembangan rudal dan nuklir secara terbuka melalui dialog. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong

Un akan bertemu pada awal Juni mendatang. Pertemuan ini menjadi bagian yang menentukan masa depan hubungan Korea Selatan-Korea Utara dan hubungan keduanya dengan komunitas internasional.

Peran China sudah tentu juga tidak bisa diabaikan, karena selama ini negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut menjadi pendukung utama Korea Utara dalam bidang ekonomi dan diplomasi, meskipun China juga pernah mengecam uji coba rudal dan nuklir Korea Utara. Keterlibatan China dalam pembicaraan damai di Semenanjung Korea dapat menjadi penguat bagi perwujudan perdamaian di kawasan ini, karena bagaimanapun China memiliki pengaruh kuat terhadap Korea Utara dan memiliki kepentingan atas kawasan ini. Kunjungan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, ke Pyongyang pada tanggal 2-3 Mei 2018, dan kunjungan mendadak Kim Jong Un ke China pada tanggal 7-8 Mei 2018, menjadi penanda bahwa China memiliki pengaruh kuat dan perlu dilibatkan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Pihak China berpandangan bahwa pertemuan antara Kim Jong Un dengan Moon Jae-in di Panmunjom pada 27 April 2018 telah membuka peluang tercapainya resolusi konflik.

Pertemuan bilateral di antara kedua pemimpin Korea tersebut di atas telah disambut baik oleh AS, Rusia, Jepang, China, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), serta masyarakat internasional yang lain, termasuk ASEAN. Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memberi isyarat bahwa kini dibutuhkan tindakan nyata. Waktu akan

menunjukkan apakah pertemuan itu sesungguhnya memberi hasil atau tidak. Kini dunia sedang menunggu, apakah pertemuan bersejarah di Panmunjom itu mampu mendorong terwujudnya hasil yang konkret.

Dunia mengakui bahwa hasil yang dicapai dari pertemuan Panmunjom hanya langkah awal dan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Bahkan, masih ada yang perlu dipertanyakan, seperti jaminan keamanan Korea Utara dari ancaman serangan jika mereka bersedia melucuti nuklirnya. Dalam pembicaraan antara Kim Jong Un dan Moon Jae-in, memang tidak disinggung simpanan nuklir yang sudah ada. Semestinya, kedua pemimpin juga membahas solusi isu nuklir. Namun demikian perlu diketahui bahwa jika terkait dengan isu nuklir, tidak mungkin hanya dibicarakan oleh Korea Selatan dan Korea Utara. AS serta China perlu terlibat, dan Presiden Donald Trump harus membuat peta jalan (*road map*) perlucutan nuklir yang lebih rinci ketika bertemu Kim Jong Un.

Kim Jong Un dikhawatirkan hanya akan mau memenuhi tuntutan komunitas internasional dan Presiden Trump demi mengurangi beban sanksi ekonomi. Di sisi lain, AS dan China pada tahun lalu sepakat bahwa perlucutan nuklir di Semenanjung Korea harus dilakukan dengan sempurna, bisa dibuktikan, dan tidak bisa diubah lagi. Sebaliknya, Korea Utara dikhawatirkan mempunyai interpretasi yang berbeda. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan diplomasi Kim Jong Un yang berjanji tidak akan lagi melakukan uji coba rudal dan nuklir serta tidak akan kembali mengembangkan persenjataan nuklir.



Meskipun demikian, pertemuan bersejarah antara Presiden Korea Selatan dan Pemimpin Korea Utara itu harus dilihat dengan lebih kritis. Betul bahwa pertemuan di Panmunjom itu merupakan sebuah peristiwa penting dalam politik internasional kontemporer, tetapi mungkin terlalu dini apabila kita berargumen bahwa perdamaian akan segera muncul di Semenanjung Korea. Silang kepentingan antar-aktor di kawasan tetap berpotensi menjadikan Semenanjung Korea sebagai salah satu “titik panas” keamanan internasional.

Korea Selatan bisa jadi akan memikul “ongkos ekonomi” yang sangat besar untuk reunifikasi, sementara Korea Utara tentu tidak menginginkan kemampuan senjata nuklirnya menjadi sia-sia. AS akan tetap mendesakkan kepentingan dan pengaruhnya di wilayah ini, bersaing dengan China yang semakin menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Rusia, yang juga berkepentingan dengan situasi di Semenanjung Korea, tentu juga tidak akan tinggal diam dalam merespons perkembangan mutakhir ini. Di samping para aktor utama tersebut, negara-negara lain tentu juga memperhatikan dengan saksama kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi menyusul pertemuan para pemimpin kedua Korea tersebut di atas.

Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, secara tidak langsung juga bisa terkena dampak dari lanjutan pertemuan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia harus selalu merespons perkembangan di Semenanjung Korea dengan hati-hati dan bijaksana. Dengan tetap mengedepankan pendekatan

diplomasi dan kerja sama, Indonesia harus siap jika diminta berkontribusi lebih banyak bagi upaya penciptaan perdamaian di kawasan itu. Tawaran Presiden Joko Widodo kepada Duta Besar Korea Selatan dan Duta Besar Korea Utara di Jakarta tentang kesiapan Indonesia jika diminta menjadi tuan rumah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bisa dimaknai sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap proses perdamaian di Semenanjung Korea.

### **Penutup**

Perdamaian di Semenanjung Korea hanya akan terwujud jika Korea Selatan dan Korea Utara mengambil langkah nyata untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Panmunjom 27 April 2018. Tindak lanjut dari hasil pertemuan Panmunjom tersebut harus dibuat kerangka waktu dan peta jalannya, baik yang berkaitan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea maupun proses reunifikasi Korea. Masyarakat internasional harus mendukung dan memberi ruang bagi kedua Korea untuk melangkah lebih pasti ke arah perdamaian permanen di Semenanjung Korea.

Keterlibatan China dalam pembicaraan damai di Semenanjung Korea juga tidak dapat diabaikan, karena bagaimanapun China memiliki pengaruh kuat terhadap Korea Utara. Negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, sesuai dengan kapasitas dan melalui jejaring internasional yang dimilikinya, harus turut mengawal proses perdamaian di Semenanjung Korea yang kini tengah memasuki perkembangan positif. Parlemen, melalui jejaring

antarparlemen di tingkat kawasan dan global, tentu juga perlu mendukung proses perdamaian di antara kedua Korea ini.

## Referensi

- “AS Tetap Hadir di Korsel”, *Kompas*, 3 Mei 2018, hal. 8.
- “Bila Diperlukan, Indonesia Siap”, *Kompas*, 2 Mei 2018, hal. 8.
- “China Ingin Tetap Dilibatkan”, *Kompas*, 4 Mei 2018, hal. 10.
- “Dua Korea Menuju Perdamaian Permanen”, *Media Indonesia*, 28 April 2018, hal. 1.
- “Jokowi Tawarkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump dan Kim Jong Un”, *Kompas.com*, 30 April 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/16430661/jokowi-tawarkan-indonesia-jadi-tuan-rumah-pertemuan-trump-dan-kim-jong-un>, diakses 1 Mei 2018.

- “Korsel dan Korut Pilih ‘Main Aman’”, *Kompas*, 28 April 2018, hal. 1.
- “Korut dan China Bertemu untuk Kedua Kali”, *Kompas*, 9 Mei 2018, hal. 8.
- “Mengenal Bom Hidrogen Korut, Kekuatan 25 Ribu Kali Bom Hiroshima”, *Sindonews.com*, 6 Januari 2016, <https://international.sindonews.com/read/1074877/45/mengenal-bom-hidrogen-korut-kekuatan-25-ribu-kali-bom-hiroshima-1452074062>, diakses 30 April 2018.
- Oberdorfer, Don and Robert Carlin. (2014). *The Two Koreas: A Contemporary History*, New York: Basic Books.
- “The Korean peace trap for the West”, *The Jakarta Post*, 2 Mei 2018, hal. 7.



Simela Victor Muhamad  
[simela.muhamad@dpr.go.id](mailto:simela.muhamad@dpr.go.id)

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986 dan pendidikan S2 Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia pada tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kejahatan Transnasional Illegal Fishing di Perairan Indonesia dan Upaya Penanganannya secara Regional di Asia Tenggara” (2011), “Sengketa Laut China Selatan dan Solusi Damai ASEAN” (2013), dan “DPR RI dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen” (2014).

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.